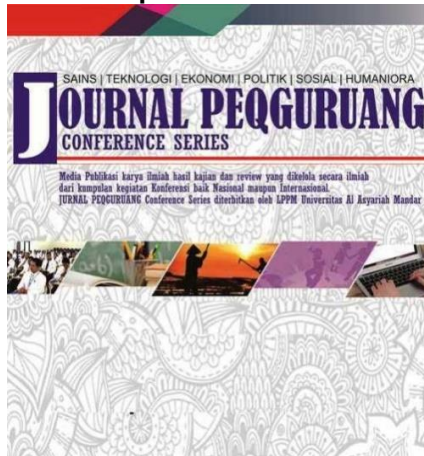


Graphical abstract



PROFESIONALISME KEPALA DESA SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PENINGKATAN PEMERINTAH DESA DI DESA TAAN

¹Fitriani, ²Aco Dahrul Saharuddin, ³Masyhadiah
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial
dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar

Corresponding email:

fitryani082193071070@gmail.com

acodahrulsaharuddin@gmail.com

masyhadiah22asraruddin@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to show how public service agencies, as village heads, who improve the service performance of Turn Village Offices, in this case, show a professional attitude by not discriminating against service users who are not using the home system. Is to find out if it can be done. What are the obstacles and efforts in the expertise of the Nation-State Organization to improve the efficiency of community service activities at the Turn Village Office. This treatise uses a qualitative approach using methods of data collection by observation, interview and documentation. Based on the research carried out, the following results and conclusions can be obtained, First: It can be concluded that the professionalism of the village apparatus towards the services of the Taan village community is indeed not yet professional because in carrying out its duties and functions as a public service, they must prioritize the interests of the community rather than their personal affairs.

Keywords: *Professionalism, State Civil Apparatus, Government Improvement, and Improve Performance.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Aparatur sipil Negara sebagai Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja pelayanan di kantor Desa Taan dapat memperlihatkan sikap yang profesional dengan tidak membedakan pengguna jasa dalam hal ini tidak menggunakan sistem keluarga, apa kendala dan upaya dalam Profesionalitas aparatur sipil Negara dalam meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat di kantor Desa Taan. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut, Pertama: Dapat disimpulkan bahwa profesional aparat Desa terhadap pelayanan masyarakat desa Taan memang belum profesional karena dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat publik, harus mementingkan kepentingan masyarakat dari pada urusan pribadinya.

Kata Kunci: *Profesionalisme, Aparatur Sipil Negara, Peningkatan Pemerintah, dan Meningkatkan Kinerja.*

Article history

DOI: <https://dx.doi.org/10.35329/jp.v3i2.2209>

Received : 10 September 2021 | Received in revised form : 15 Oktober 2021 | Accepted : 19 November 2021

1. PENDAHULUAN

Upaya untuk mewujudkan *good governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan public. Profesionalisme disini lebih menekankan pada kemampuan, keterampilan, dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan public yang efektivitas dan efisien.

Menurut Suwinardi (2017) Profesionalisme dapat diartikan suatu watak yang diwujudkan dalam suatu tingkah laku, suatu tujuan dalam menjalankan profesi yang akan menghasilkan kualitas terbaik dari pekerjaannya.

Sedangkan menurut Sagala (2009: 1), Profesionalisme merupakan cerminan keterampilan dan keahlian aparatur yang dapat berjalan dengan kesesuaian tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki aparatur, baik dari aspek kemampuan maupun aspek tingkah laku yang mencakup loyalitas, inovasi, produktivitas dan kreatifitas. Seorang profesional mempunyai kebermaknaan ahli (*expert*) dengan pengetahuan yang dimiliki dalam melayani pekerjaannya, tanggung jawab (*responsibility*) atas keputusannya baik intelektual maupun sikap, dan memiliki rasa kesejawatan menjunjung tinggi etika profesi dalam suatu organisasi yang dinamis.

Istilah profesional sudah dikenal luas di kalangan masyarakat. Namun pengertian yang muncul di masyarakat umum seolah-olah istilah profesional hanya ditujukan bagi aparatur (personil) tingkat pimpinan (manajer). Sesungguhnya istilah profesional itu berlaku untuk semua aparatur (personil) mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Untuk mencapai tujuan public yang demokratis, tentu kinerja birokrasi harus profesional, dan untuk mencapai profesionalitas birokrasi harus berpegang pada nilai evketifitas dan efesiensi (Widodo, 2005:315)

Profesionalisme sangat ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang tugas dan tingkatan masing-masing. Hasil dari pekerjaan itu lebih ditinjau dari segala segi sesuai dengan porsi, obyek, bersifat terus menerus dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun serta jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang relatif singkat (Suit Almasdi 2000:99).

Keberhasilan perbaikan-perbaikan pelayanan yang diharapkan dalam sektor pelayanan publik khususnya pelayanan administrasi tidak terlepas dari kinerja para aparatur pemerintah (Nur Fitrah, M. Said Saggaf. 2018)

Hal yang dilematis terjadi ketika kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik meningkat, tidak dibarengi oleh keahlian dan keterampilan aparatur untuk membentuk suatu mekanisme kerja pelayanan yang baik. Masih sering dijumpai pelayanan aparatur dengan prosedur berbelit-belit (*biokratis*), tidak adanya

kepastian, kurang transparan, lamban dengan disertai adanya pemungutan biaya tambahan diluar biaya resmi. Akibat yang dapat dilihat sekarang banyak masyarakat pengguna jasa pemerintah sering dihadapkan pada begitu banyak ketidak pastian ketika mereka berhadapan dengan aparat birokrasi (Dwiyanto, 2000:7).

Yani Alfian & Apip Pudih Rahmat (2019) Perencanaan pembangunan di daerah desa tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintah desa yang merupakan unit terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis dalam keberhasilan seluruh program pembangunan.

Berkenaan dengan fenomena di atas, terdapat beberapa permasalahan umum yang menyangkut kondisi aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yakni: *pertama*, masih relatif rendahnya dalam kemampuan berkomunikasi dan penguasaan informasi secara global untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan; *kedua*, belum mampunya setiap aparatur mengimplementasikan pertanggungjawaban secara penuh (*personal accountability*) sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; *ketiga*, lemahnya akselerasi penyelesaian tugas pekerjaan yang dapat mengakibatkan penundaan waktu; *keempat*, masih lemahnya kemampuan menyusun agenda kegiatan yang memprioritaskan kebutuhan penunjang kerja bagi perangkat daerah otonom yang bersifat *best practice* ; dan *kelima* belum mampunya membuat jejaring kolaborasi (*net working*) dengan dinas/instansi perangkat otonom terkait dalam menyusun agenda kerja untuk mendukung kelancaran tugas-tugas Bupati Mamuju.

Berhubungan dengan masalah tersebut, banyak hal yang telah diupayakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mamuju agar seluruh aparatur memiliki kemampuan, kompetensi, performansi, loyalitas, akuntabilitas, responsibilitas dan sikap proporsional sesuai dengan visi serta misi organisasi. Upaya-upaya tersebut diantaranya adalah memberikan kesempatan pelaksanaan pendidikan formal melalui program tugas belajar dan ijin belajar, melaksanakan diklat penjenjangan pegawai, melengkapi berbagai sarana dan prasarana yang penunjang penyelesaian pekerjaan serta membentuk jaringan kemitraan kerja baik dengan sesama aparatur maupun dengan pihak-pihak terkait.

Cita ideal profesionalisme aparatur tersebut tidak mudah terbentuk tanpa dukungan kemampuan, kompetensi dan performansi yang sesuai dengan bidang tugasnya. Ketiga hal tersebut merupakan komponen-komponen yang saling terkait dan berhubungan dalam membentuk sosok profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai bidang masing-masing.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran mengenai profesionalisme Kepala Desa sebagai ASN dalam peningkatan pemerintah desa di Desa Taan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian deskriptif kualitatif, dimana tipe penelitian deskriptif adalah penyelidikan yang dilakukan terhadap variable mandiri atau satu variabel, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti yaitu profesionalisme kepala desa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam peningkatan pemerintah desa di Desa Taan, pada teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik observasi data, yangkemudian diperoleh hasil dari observasi tersebut.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju, tepatnya pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2021

Informan dan key Informan

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dan hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel (Suyanto,2005:171).

Menurut Bagong (Suyanto 2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu :

1. Informan kunci (key informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah:

Tabel 3.1
Pemerintah Desa Taan

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Jabatan	Alamat
1	Rahmat Kasim	L	45	SMA	Kepala Desa	Dusun Taan
2	Amirullah, S.Pd	L	43	S1	Sekretaris Desa	Taan
3	Jawadi, S.Pd	L	41	S1	Bendahara Desa	Dusun Landa
4	Marsuki	L	28	SMA	Kepala Seksi	Pa.bettengan
5	Jasikin, S.Pdi	L	33	S1	Kepala Dusun	Kampung Baru
6	Lukman	L	47	SMA	Kepala Dusun	Dusun taan
7	Kamaruddin	L	47	D3	Anggota BPD	Pa.bettengan
8	Agus Yusuf	L	58	SMA	Tokoh Masyarakat	Taan
9	Mansur	L	48	SMA	Tokoh Agama	Pa.bettengan
10	Suwardi Nur	L	37	SMA	Tokoh Pemuda	Pa.bettengan
11	Rafina, S.Pd	P	32	S1	Tokoh Perempuan	Pa.bettengan
12	Njamat	L	47	SMA	Tokoh Pendidik	Serang
13	Anwar	L	50	SMA	Tokoh Adat	Kampung baru
14	Heji	L	25	S1	Pemerhati lembaga	Serang

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua, yakni:

1. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh di lapangan melalui observasi dan wawancara (*interview*). Wawancara dilakukan kepada narasumber yang terkait dengan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dalam hal ini dokumen atau informasi lain yang diperoleh dari pihak-pihak terkait serta data yang diperoleh dari media elektronik yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi dilakukan pengamatan secara langsung yang dilakukan penulis dilokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta social sehingga dapat dicocokkan antara sebuah hasil wawancara atau dari informasi yang berasal dari informan dengan fakta yang ada dilapangan.

2. Wawancara (*interview*)

Sehubungan dengan hal ini, maka dilakukan wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dengan pihak terkait yang telah disebutkan di atas. Kemudian terjadi perkembangan pertanyaan-pertanyaan saat melakukan wawancara di lapangan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini akan dilakukan pencatatan terhadap data yang diperoleh dan data yang bersumber dari literatur yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Selain itu ada pula data yang diperoleh dari media elektronik yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

Instrumen Penelitian

Data merupakan salah satu unsur pokok dari sebuah penelitian. Keakuratan sebuah hasil penelitian dipengaruhi oleh kualitas data yang digunakan. Pengumpulan data serta instrument yang digunakan di dalam proses pengumpulan data mempengaruhi kualitas data yang di kumpulkan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk menjadi acuan peneliti dalam mendapatkan sebuah jawaban sesuai dengan penelitian yang di lakukan ialah dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan pedoman wawancara, observasi, dokumentasi, data pustaka, majalah/media.

Instrumen adalah sebuah alat atau pasilitas yang dipergunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan suatu data agar pekerjaannya lebih mudah dan gampang serta hasilnya lebih baik, sehingga mudah untuk diolah (arikunto 2006).

Bogdan dan Biklen (dalam Djam'an Satori., 2011: 62) menyatakan bahwa *qualitative research has the natural setting as the direct source of data and the researcher is the key instrument*. Artinya, Penelitian kualitatif mempunyai setting yang alami sebagai sumber langsung dari data dan peneliti itu adalah instrument kunci. Maksudnya adalah peneliti sebagai alat pengumpul data utama. Dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya. Selain itu, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti (Sugiono, 2009: 365).

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses untuk menganalisis dengan maksud menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh dengan mengolah data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menginterpretasikan terhadap yang ditentukan dalam penelitian serta pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran sistematis, atau analisis data yang tidak bisa dikategorikan secara statistik.

Analisis kualitatif digunakan berupah model analisis interaktif, dimana analisis model ini memperlakukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan proses siklus. Menggunakan analisis kualitatif model ini, maka dengan menggunakan logika atau penalaran sistematis dalam menginterpretasikan terhadap apa yang ditentukan dan pengambilan kesimpulan akhir. Ada tiga komponen pokok dalam tahapan analisa data, yaitu:

- a. Data *reduction* merupakan prose seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam vield note. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data dapat disedehanakan dan ditransformasikan melalui seleksi ketat, ringkasan serta pengolongan dalam suatu pola.
- b. Data *display* adalah rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dilakukan, sehingga peneliti akan dengan muda memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan.
- c. *Canclution drawing* dari awal pengumpulan data peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab akibat sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian

1) Profesionalisme Kepala Desa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam peningkatan pemerintah desa di Desa Taan

Desa Taan merupakan desa bagian wilayah Mamuju yang berbatasan dengan Desa Maliaya kabupaten Majene yang mempunyai 10 dusun yang terletak di Kecamatan Tapalang, Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh perangkat desa, selain melaksanakan tugas sebagai pemerintah Desa Taan dia juga melaksanakan tugasnya selaku ASN yang mengajar di salah satu sekolah di Desa Taan sehingga sebagian tugas yang ada di desa di laksanakan oleh Sekertaris Desa atau perangkat desa lainnya.

Desa Taan sebagaimana yang di jelaskan dalam gambaran umum Desa taan, mempunyai system pemerintahan yang baik dan demokratis dalam upaya mewujudkan aparatur pemerintah yang baik, bertanggung jawab, transparansi dan professional berarti pemerintahan yang terbuka atas penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan secara umum sehingga masyarakat menganggap bahwa aka ada peningkatan pembagunan secara merata dan adil. Dalam penelitian ini saya akan mengangkat penelitian peningkatan pemerintah desa, dituntutnya untuk meningkatkan pemerintahan di Desa secara professional agar semua masyarakat tidak ada yang merasa ter marjinerkan dan mendapatkan hak yang sama dalam pemerintahan tersebut. Selanjutnya dalam penelitian ini juga peeneliti ingin mengetahui bagaimana profesionalitas seorang ASN sebagai Kepala Desa dalam pelayanan publick terhadap masyarat di Desa Taan kecamatan Tapalang.

Menurut samana profesionalisme adalah:

1. Seorang pekerja yang terampil atau cakap dalam bekerja
2. Seorang yang dituntut menguasai Visi yang mendasari keterampilannya menyangkut wawasan filosofis, pertimbangan nasional, dan memiliki sikap yang positif dalam melaksanakan serta mengembangkan mutu karyanya.
3. Mempunyai ciri :
 - 1) Memerlukan persiapan atau pendidikan khusus
 - 2) Memenuhi persyaratan yang telah dibebankan oleh pihak yang berwenang.
 - 3) Mendapat pengakuan masyarakat atau Negara.
 - 4) Berkecaakaan kerja (berkeahlian) sesuai dengan tugas khusus serta tuntutan dari jenis jabatannya.
 - 5) Menurut pendidikan yang terprogram secara reelevan, sehingga terselenggara secara evektif dan efesien dan tolak ukur yang berstandar.
 - 6) Berwawasan sosial, bersikap positif terhadap jabatannya dan perannya serta bermotivasi untuk bekerja dengan sebaik-baiknya.

- 7) Memiliki kode etik yang harus di penuhi.
- 8) Mencintai profesinya dan memiliki etos kerja yang tinggi serta selalu meningkatkan diri serta karyawannya.

Pernyataan diatas tentunya menjadi landasan bahwa profesionalisme tersebut harus memiliki dan membutuhkan sumber daya manusia yang baik. Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pemikiran dan daya fisik yang di punyai seseorang baik itu individu maupun kelompok. Prilaku beserta sipatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh kemauan dan keinginan yang besar untuk memenuhi kepuasannya.

Jika seorang ASN yang jadi Kepala Desa bersama perangkatnya mempunyai sumber daya manusia yang kemampuannya baik dan memiliki keterampilan seperti yang disebutkan di atas barulah bisa mencapai profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan serta meningkatkan pemerintahan desa serta pelayanan terhadap masyarakat.

Berbicara tentang peningkatan pemerintah desa di Desa Taan perlu adanya pemerintah desa mengetahui fungsi pemerintahan, ada *empat* fungsi pemerintahan menurut *Rasyid* yaitu, “pelayanan (publik service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering) dan pengaturan (regulacion).

Pelayanan dalam pemerintahan adalah sama apa yang diinginkan serta ditunggu oleh rakyat dengan apa yang ingin diberikan oleh pemerintah. Barulah masyarakat merasakan akan pelayanan yang baik dan didukung dengan sikap, tingkah laku dan perlakuan baik yang ditunjukkan aparat pemerintah desa dalam melaksanakan dalam percepatan peningkatan pemerintahan serta pelayanan public tersebut, berlandaskan hal tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana pelayanan yang diberikan aparat desa Taan terhadap masyarakat dengan mencoba mewawancarai masyarakat Desa Taan itu sendiri. Menurut bapak *Agus Yusuf*,

“saat saya membuat surat di kantor Desa Taan masih menunggu lama, da nada saja salahnya, terkadang salah nomor surat, tanggal lahir serta format yang berbeda, inilah yang membuat saya kewalahan dan seharusnya surat yang saya urus harus cepat karna untuk syarat kepentingan di Bank BRI”(wawancara dengan pak Agus yusuf, senin 26,04,2021)

Berbeda dengan pendapat *bapak Anwar* seorang mantan Kepala Desa Bambang sekaligus sebagai tokoh adat, sebagaimana yang kami kutip beliau mengatakan bahwa:

“Setiap saya kekantor jarang sekali saya mendapati kepala desa cepat masuk bahkan yang saya dapati paling satu dua orang perangkat Desa itupun perangkat yang kurang mengerti dan membuat persuratan. Inilah yang membuat saya terlambat untuk menyelesaikan cepat administrasi yang saya urus”(Senin,26-04-2021)

Lanjut dalam ungkapannya, itulah bedanya Kepala Desa orang biasa dan orang yang dari ASN, jika kepala Desa dari orang umum atau masyarakat biasa otomatis dia hanya terpokus ke satu pekerjaan, tetapi jika dia seorang ASN pasti pekerjaannya terbagi antara tugas sebagai kepala Desa dan sebagai aparatur sipil Negara yaitu tenaga pengajar.

Tidak jauh berbeda dari apa yang disampaikan oleh bapak *Niamat* seorang tokoh pendidik, terkait dengan pertanyaan serupa kami lontarkan ke bapak *Anwar* terkait profesionalisme ASN sebagai Kepala Desa, Beliau mengatakan bahwa:

“sering saya dengar dari masyarakat bahwa para perangkat desa jika melayani masyarakat lebih mengedepankan hubungan keluarga dalam artian siapa yang dekat dengan mereka dalam artian keluarga dekatnya atau seorang tim pemenangan kemarin maka dia yang didahulukan walaupun kedatangannya ke kantor merupakan orang terakhir datang. Kalau memang begitu kebenarannya yang di isukan masyarakat maka profesionalisme ASN tdk berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh Masyarakat”(senin-26-04-2021)

Dari pernyataan masyarakat tersebut sejauh ini dapat disimpulkan bahwa, untuk bersikap professional di tatanan pemerintahan apalagi pemerintahan Desa yang dipimpin oleh ASN belum profesional karena masih jauh dari etika birokrasi yang mana harus menempatkan kepentingan public di atas kepentingan pribadi, kelompok dan organisasi. Kemudian masih terkait dengan profesionalisme ASN sebagai Kepala Desa dalam peningkatan Pemerintah Desa, kami mencoba mewawancarai yang bersangkutan yaitu Bapak Kepala Desa Taan yaitu Bapak *Rahmat Kasim* dalam wawancara kami dengan beliau di mengatakan bahwa :

“Dalam menjalankan fungsi sebagai pemerintah desa tidak ada yang membedakan antara ASN dan masyarakat biasa. Saya seorang ASN yang dipercaya masyarakat untuk memimpin Desa Taan sudah berusaha bekerja dengan maksimal namun biasa terjadi apa yang kita harapkan berbeda saat kita berada di lapangan. Bahkan sampai saat ini kami pun melayani masyarakat di luar jam kerja. Namun jujur yang menjadi sebuah permasalahan di desa yaitu masih kurangnya pemahaman para perangkat desa terkait regulasi dan tahapan tahapan yang ada”.(senin-26-04-2021)

Lanjut kami wawancarai sekretaris Desa yaitu *Amirullah, S.Pd* beliau mengatakan bahwa:

“Untuk bekerja maksimal kami sudah lakukan, namun namanya masyarakat pasti tidak akan puas dengan apa yang kami lakukan apalagi kalau masyarakat itu merupakan lawan politik kami kemarin dan itu wajar wajar saja. Namun sampai hari ini kami bekerja dengan baik serta kami sudah menghilangkan yang namanya teman atau lawan karna hal itu sudah berlalu yang penting sekarang adalah semua satu yaitu masyarakat Desa Taan”.(Senin,26-04-2021)

Membahasakan sebuah kalimat atau kata Profesionalisme itu pasti berbeda-beda cara memahaminya, namun jika kita melihat apa yang di ungkapkan seorang samana terkait dengan profesionalisme salah satunya adalah seorang yang dituntut menguasai visi yang mendasari keterampilannya yang menyangkut wawasan filosofis, pertimbangan nasional, dan memiliki sikap yang positif dalam melaksanakan serta mengembangkan mutu kerjanya. Maka jika kami peneliti mencocokkan apa yang disampaikan masyarakat dalam wawancara kami bahwa profesionalisme seorang ASN jadi kepala Desa belum mampu membawa para perangkatnya untuk bisa bekerja dengan baik sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya di Desa Taan.

Dalam pandangan seorang pemuda sekaligus penggiat seni yaitu saudara *Heri niamat* mengatakan bahwa:

“Bahwa salah satu yang saya liat kalau profesionalisme yang ada di pemerintahan desa Taan belum terlaksana dengan baik dibuktikan dengan masih banyaknya perangkatnya yang berbeda pendapat dan bahkan berselisih serta saling mencemburui atas tempat dan jabatan yang di embang masing-masing. Salah satu pemicunya karna pucuk pimpinan tidak mampu memberikan cerminan yang sebenarnya bagaimana menerapkan etika profesionalisme itu”.(Kamis-29-04-2021)

Selanjutnya pelayanan-pelayanan yang lain yang dilakukan pemerintah desa dalam merespon aspirasi masyarakat, seperti yang di sebutkan dalam responsivitas disebutkan kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun sebuah agenda dan memprioritaskan pelayanan, serta mengembangkan program-pelayanan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Tetapi di Desa Taan menurut *Ratna, S.Pd* seorang tokoh perempuan mengatakan bahwa responsivitas aparat desa tidak sesuai dengan pernyataan tersebut diatas itu dibuktikan dengan pernyataan berikut ini dari beliau:

“Lambatnya respon dari pemerintah terhadap masalah-masalah yang terjadi di Desa Taan membuat semua proses pemerintahan berjalan lamban serta pelayanan yang harus prima untuk melayani masyarakat juga mengalami keterlambatan. Terbukti dengan adanya masalah pada sector pembangunan drainase, pansimas, serta pembagian BLT DD yang dilakukan kemarin serta kurang tranparannya dengan adanya pengelolaan BUMDes di Desa Taan sampai saat ini”.(Kamis,29-04-2021)

Berdasarkan wawancara diatas terkait lambangnya respon pelayanan terhadap masalah-masalah yang ada di desa dapat disimpulkan bahwa aparat desa harus profesional dalam menjalankan tugasnya serta fungsinya sebagai seorang pelayan publik, harus mementingkan dan mengedepankan masyarakat dari pada urusan pribadinya sebagaimana

yang di amanahkan oleh Undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014.

2) Kendala dan Upaya dalam Profesionalisme Aparatur Sipil Negara di Desa Taan dalam Meningkatkan kinerja pemerintahan

a. Kendala profesionalisme ASN sebagai Kepala Desa di Desa Taan

Jabatan sebuah kekuatan seseorang atau lembaga untuk melakukan keinginannya dalam sebuah pemerintahan, jabatan mampu merubah sebuah kebijakan yang sudah di sepakati bersama serta mampu meng hentikan sementara proses pembangunan yang sudah berjalan. Namun jabatan tidak menjamin seseorang untuk profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama di bidang pelayanan yang masih di sisipkan akan adanya rasa kekeluargaan yang di dahulukan di banding kepada orang lain.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dan perangkatnya dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat desa. Dalam menjalankan tugas pelayanan public di Kantor Desa Taan, penulis mewawancarai Kepala Desa tentang kinerja perangkat desa yang ada sampai dimana kemampuannya dan profesionalnya dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Kita tau bahwa perangkat desa Taan itu sebanyak 14 orang sudah termasuk stap di desa. Berdasarkan hal tersebut jumlah aparat bukanlah menjadi kendala dalam melakukan pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat, namun yang menjadi kendala ketidak profesionalnya aparat dalam bekerja sesuai apa yang di ungkapkan Bapak Rahmat Kasim selaku kepala Desa Taan beliau mengatakan:

“Apa yang dikatakan warga masyarakat terkait dengan pembuatan surat yang salah nama, tanggal lahir, dan salah pormat dan lain-lain itu maklumlah ada kesalahan pengetikan karna kami dikantor bukan Cuma pelayanan yang dilakukan tapi banyak kegiatan lain yang takkalah pentingnya yang berkaitan dengan peningkatan pembangunan di desa. Terkait hal-hal yang lain yang disampaikan masyarakat tentang kurang informasi sebenarnya kami sudah berupaya untuk memaksimalkan dan mengimpormasikan segala sesuatu yang menjadi penting untuk masyarakat baik itu lewat papan pengumuman baik lewat pengeras suara di masjid, namun namanya manusia biasa susah untuk sempurna”.(Kamis,29-04-2021)

Hampir sama apa yang di ungkapkan oleh Bapak *Jayadi, S.Pd* selaku Kaur Keuangan disaat kami sambangi di ruangannya, dalam ungapannya beliau mengatakan bahwa:

“Apa yang disampaikan oleh masyarakat mungkin ada benarnya namun kami selaku pelayan masyarakat sudah berupaya untuk bekerja maksimal. Memang jujur kami sampaikan yang menjadi kendala yang kami hadapi dalam professional aparat Desa adalah kurangnya kegiatan untuk memberdayakan masyarakat disebabkan kurangnya anggaran ke situ

dan yang lebih utama karna kurangnya pasilitas untuk kegiatan pemberdayaan desa". (Kamis,29-04-2021).

Dari kedua orang diatas selaku pemerintah desa yang peneliti wawancarai, dapat kami gambarkan bahwa jumlah perangkat desa sudah mencukupi dalam bekerja namun kendala yang mempengaruhi Pemerintah Desa bekerja tidak professional dibuktikan dengan masih kurangnya pemberdayaan masyarakat, dan pengimpormasian yang diberikan sehingga terjadi komunikasi yang kurang baik antara pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri.

b. Upaya dalam profesionalisme ASN sebagai Kepala Desa di Desa Taan.

Setelah mengetahui kendala-kendala ketidaksi profesionalnya para perangkat Desa di Desa Taan, selanjutnya peneliti ingin mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan aparat desa dalam memperbaiki kinerja mereka terhadap tanggapan masyarakat, seperti pernyataan yang di ungkapkan oleh Bapak Kepala dusun Taan bapak Lukman beliau mengatakan:

"Upaya yang harus dilakukan pemerintah Desa adalah terus menyaring kritik dan masukan serta saran kepada mereka juga kepada kami karna kami merupakan bagian pemerintah desa agar kami bisa memperbaiki diri kedepannya, dengan cara mencoba mengadakan pelatihan-pelatihan dan mengikutinya termasuk pelatihan untuk bidang masing-masing agar mendapatkan pengetahuan terkait bidangnya, supaya nantinya dapat menjalankan pemerintahan yang baik serta penerapan absensi pagi dan sore harus dilakukan supaya tidak ada lagi perangkat desa yang bolos atau terlambat masuk kerja".(Jum,at,30-04-2021)

Selanjutnya menurut pernyataan bapak Marsuki Mansur salah satu perangkat Desa di Desa Taan dalam Hasil wawancara kami dengan beliau terkait dengan profesionalisme aparat sebagai berikut:

"Kami berusaha bekerja dengan teliti lagi kedepannya agar tidak ada lagi kesalahan dalam benerja, dan lebih meningkatkan sebuah kedisiplinan dalam lembaga kami baikpun dalam pribadi agar tidak ada lagi aparat yang pergi terlambat dan pulang cepat sebelum jam pulang serta kami menjalankan absensi masuk dan datang. Serta lebih mengawasi setiap informasi yang datang dari daerah dan mensosialisasikan serta mengumumkannya lewat papan informasi dan sumber suara di masjid".(Jum,at,30-04-2021)

Dari pernyataan di atas dapat di lihat dan di simpulkan bahwa sudah ada upaya pemerintah Desa untuk memperbaiki pelayanan yang belum maksimal di desa, baik itu pelayanan administrasi maupun pelayanan yang lain menyangkut peningkatan pemerintah Desa di Desa Taan. Semua itu tidak lain dilakukan untuk tercapainya aparat desa yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya demi mewujudkan visi dan misi kepala desa terpilih dan juga dia seorang ASN.

b. Pembahasan

1. Karakteristik / ciri-ciri sosok Profesionalisme Aparatur sesuai dengan tuntutan Good Governance.

Menurut Mertin Jr. (Dalam Islami, 1998: 25-26) karakteristik/ciri-ciri sosok profesionalisme aparaturnya sesuai dengan tuntutan Good Governance adalah sebagai berikut:

a. Persamaan.

Eguality/Persamaan adalah perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan. Hal didasarkan atas tipe perilaku biokrasi rasional yang secara konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas kepada semua pihak tanpa memandang afiliasi politik, status sosial dan sebagainya. Bagi mereka memberikan perlakuan yang sama identic dengan berlaku jujur. Menurut Merti Jr (dalam islami, 1998:25-26), mengenai ciri propesionalisme aparaturnya sesuai dengan tuntutan *good governance*.

Sesuai hasil wawancara penulis maka penulis mengartikan persamaan adalah suatu perlakuan seseorang terhadap orang lain, baik itu perlakuan dalam lingkup masyarakat, lingkup organisasi atau kelompok maupun dalam lingkup organisasi pemerintahan dimana seorang pimpinan memberikan perlakuan sama terhadap bawahan serta seorang pemerintah atau Kepala Desa memberikan pelayanan yang sama dan tidak membedakan antara keluarga dan orang lain dalam melayani agar tercapai pemerintahan yang *Good Governance*. Sesuai apa yang di isyaratkan Undang-undang Dasar 1945.

Sementara penelitian terdahulu oleh Afin Okidiansyah Vidianto Uin Suska Riau dengan analisis profesionalisme kerja pegawai pada kantor dinas perkebunan Kabupaten Kuantang Singingi. Dari hasil penelitian terdahulu tersebut lebih menekankan keprofesionalismenya seorang Kepala Desa. Dari teori Mertin Jr serta peneliti terdahulu dan sebagai peneliti sekarang dapat menyimpulkan secara garis besar bahwa ciri profesionalisme tentang *equality* atau persamaan garis besarnya bisa disimpulkan adalah tanggungjawab sepenuhnya.

b. Keadilan.

Selajuknya ciri kedua profesionalisme aparaturnya yaitu *equity* atau/keadilan menurut Mertin Jr (dalam islami, 1998:25-26). Adalah perlakuan yang sama kepada masyarakat tidak cukup. Selain itu juga perlakuan yang adil untuk masyarakat yang lurahlistik kadang-kadang di perlukan perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama dan kadang-kadang pula diperlakukan perlakuan yang adil tapi tidak sama kepada orang tertentu.

Sementara menurut penulis Keadilan sangat berkaitan dengan Hak, hak merupakan kewajiban seseorang menurut konsep Bangsa Indonesia yang tidak bisa dipisahkan. Dalam pemerintahan keadilan merupakan penilaian dengan memberikan kepada siapapun atau Masyarakat sesuai apa yang menjadi haknya, serta pemerintah atau Kepala Desa bertindak dengan professional dan tidak melanggar hukum dalam

memberikan sebuah pelayanan. Dengan demikian akan tercipta pemerintahan yang *Good Governance*.

Yang namanya perlakuan adil itu pasti dimiliki oleh pemerintah, baik itu pemerintah yang tinggi maupun pemerintah yang paling kecil, namun apa yang dilakukan Pemerintah Desa Taan pasti banyak persi dalam menilainya karna disebabkan pemimpin yang terpilih lewat alur politik. Disini penulis menyimpulkan antara pendapat Mertin Jr tentang ciri profesionalisme aparatur dengan hasil peneliti dilapangan bisa disimpulkan bahwa pada dasarnya jika pemimpin lahir dari sebuah demokrasi maka yakin dan percaya rasa kepuasan yang dimiliki masyarakat terkait keadilan akan berbeda disebabkan adanya pro dan kontra di dalam wilayah Desa itu.

c. Loyalitas

Loyalty atau loyalitas menurut Mertin Jr dalam ciri ketiga profesionalisme adalah kesetiaan diberikan kepada konstitusi, Hukum, Pimpinan, Bawahan dan Rekan kerja. Berbagai jenis kesetiaan tersebut terkait satu sama lain dan tidak ada kesetiaan yang muklat diberikan kepada satu jenis kesetiaan tertentu dengan mengabaikan yang lainnya.

Sementara tanggapan penulis tentang adalah Loyalitas seorang Aparatur Negara adalah bentuk kesetiaan terhadap Bangsa dan Negara, masyarakat dan kelompok serta terhadap seseorang. Kesetiaan umumnya dipahami sebagai suatu pengabdian dan kepatuhan terhadap apa yang menjadi propeksi seseorang. Dalam pemerintahan desa kesetiaan merupakan pengabdian dan kepatuhan terhadap masyarakat, pengabdian merupakan pemberian pelayanan terhadap masyarakat dengan sebaik-baiknya sedangkan kepatuhan adalah melaksanakan pelayanan dengan memperhatikan dan patuh terhadap aturan-aturan yang mengatur dalam pelayanan. Dalam memimpin sebuah pemerintahan desa dengan rasa loyalitas atau kesetiaan maka akan terjadi pemerintahan yang jujur sebab kesetiaan akan menimbulkan kejujuran dalam memimpin. Setelah penulis sandingkan dari pernyataan menurut Mertin Jr dan hasil wawancara penulis mempunyai persamaan tentang pemahaman terkait loyalitas atau *loyalty* yaitu kesetiaan diberikan kepada komsumen atau masyarakat terkait pelayanan di pemerintahan.

Sebagai kesimpulan dari penulis bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan Pemerintah Desa Taan dan jajarannya sudah sangat bertanggungjawab di dalamnya maka loyalitas atau kesetiaan yang di miliki itu sangat baik adanya.

d. Akuntabilitas

Accountability atau Akuntabilitas menurut Mertin Jr terkait ciri keempat dari profesionalisme apatur adalah setiap aparatur pemerintah harus siap menerima tanggungjawab atas apapun yang ia kerjakan dan harus memhindarkan diri dari sindroma “saya sekedar melaksanakan perintah atasan”.

Menurut penulis dari hasil dan wawancara dari berbagai unsur terkait Akuntalibitas penulis mengartikan bahwa Akuntabilitas adalah suatu

pertanggung jawaban terhadap pekerjaan yang kita geluti, dalam sebuah organisasi pemerintahan terutama pemerintahan desa seorang Kepala Desa harus mempertanggungjawabkan hal-hal yang menjadi tugas, fungsi, dan kewenangannya. tanggung jawab yang utama sebagai kepala Desa adalah mempublikasikan dan memajang penggunaan anggaran di desa serta tranparansi terkait perekrutan kepengurusan organisasi yang bermitra dengan pemerintah dan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pada intinya akuntabilitas adalah sebuah tanggung jawab dan mengarah ke transparansi.

Penulis menyimpulkan mulai dari poin pertama sampai poin keempat, bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah semata, namun pemerintah desa sudah berupaya dengan maksimal untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya. Tapi bagi masyarakat selalu ada yang pro dan kontra karna masih ada dibenak mereka tentang perbedaan dukungan di waktu pilkades kemarin jadi untuk itu dipastikan tetap ada yang tidak puas dalam pengelolaan pemerintahan desa oleh Kepala Desa dan Aparaturnya.

1. Faktor yang mempengaruhi Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam peningkatan pemerintah desa di Desa Taan.

1. Kepemimpinan

Kepemimpinan yang ideal adalah kepemimpinan yang mampu memerangkan dan memposisikan diri sebagai actor yang bisa berpengaruh bagi bawahan dalam segala hal baik dalam meningkatkan prestasi kerja seperti memberikan ruang dan peluang bagi seorang bawahan untuk melakukan sebuah inovasi serta memberikan kewenangan sepenuhnya dalam melaksanakan tugas untuk bisa bertanggung jawab sepenuhnya dan dapat menjadi contoh kepada bawahan yang lain. Kepemimpinan merupakan bentuk dari kemampuan seseorang pemimpin untuk menjadi agen perubahan dalam sistem pemerintahan serta mampu mempengaruhi perilaku bawahan guna mendapatkan tujuan pemerintahan yang professional dan memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu serta mewujudkannya.

Kepemimpinan yang berkarakter akan membawa sebuah agen perubahan terhadap perilaku bawahan yang pada akhirnya berdampak pada *peningkatan kinerja* aparatur Pemerintah Desa Taan. Kepemimpinan harus mampu menghadapi dan memahami adanya perbedaan kepentingan antyara individu dan kelompok.

Berbeda-beda karakter dalam kepemimpinan yang di miliki oleh para pimpinan ada yang menganggap bahwa kepemimpinan itu adalah seni da nada pula yang menganggap bahwa kepemimpinan itu adalah beban moral yang harus di pertanggung jawabkan dunia akhirat nanti, jika kita bawah serius hasilnya akan serius tapi jika kita bawa santai maka masalah dan hambatan dalam memimpin akan biasa-biasa saja seakan tidak ada beban yang di emban.

Sebagai kesimpulan dari penulis tentang kepemimpinan adalah bahwa dalam kepemimpinan Kepala Desa *Rahmat Kasim* semenjak terpilih sampai sekarang beliau tidak mampu memaksimalkan dirinya dalam memimpin sebuah desa disebabkan pekerjaan beliau terbagi antara mengajar dan pelayanan publik.

2. Penghargaan

Organisasi, baik pemerintah atau sosial, yang bentuk dan tujuannya adalah untuk menawarkan penghargaan atau penghargaan kepada anggota atau karyawan yang berprestasi, menerima insentif finansial dan non-finansial. Hal ini meningkatkan produktivitas perangkat baik dan buruk, terutama yang berkinerja baik di kantor, membuat karyawan lain bekerja keras dan menekuni bidangnya masing-masing.

Setelah kami sebagai peneliti melihat dan mendengar semua hasil penelitian kami, kami dapat menyimpulkan bahwa didalam suatu organisasi atau pemerintahan sangat sulit kita melakukan sesuatu hal yang dianggap itu benar jika diluar masih ada kepentingan yang di bawah kedalam pemerintahan. Kesulitan yang lain adalah jika seorang pemimpin tidak mampu untuk memberikan contoh perilaku bagaimana memimpin suatu desa yang baik, sopan dan beretika seta seorang pemimpin mampu menempatkan posisinya di saat kondisi yang diperlukan.

Garis besar semua ini adalah sikap konsistensinya seorang pemimpin untuk professional terhadap semua yang menjadi tanggung jawabnya dalam memimpin pemerintahan desa.

4. SIMPULAN

Berdasarkan atas uraian hasil penelitian dan Pembahasan yang di peroleh atas pengksajian terhadap profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Kepala Desa di Desa Taan Kecamatan Tapalang menyimpulkan:

1. Keahlian perangkat Desa Giliran untuk pelayanan masyarakat secara keseluruhan belum terlalu profesional karena masih lebih mengutamakan kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PNS. Kepentingan masyarakat. Fungsi walikota yang didukung oleh perangkat desa tidak berjalan dengan baik, tetapi harus dijalankan dengan baik oleh perangkat desa agar pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visinya. Kewajiban saat melamar balai desa. Oleh karena itu, melihat tingkat reaksi kepala desa terhadap pelayanan masyarakat, mereka menerima umpan balik, tetapi dengan alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peralatan desa Taan dalam memenuhi misinya belum sempurna. profesional.
2. Kendala yang dihadapi kepala desa adalah belum sepenuhnya memahami dan mengoptimalkan pelayanannya, daripada berbicara tentang isu pemberdayaan. Ini hampir pasti bukan hanya tentang pemberdayaan masyarakat lokal. Apa

yang paling mengesankan ketika ada informasi yang hanya diketahui oleh subjek tertentu, atau ketika ada kekurangan informasi yang dikomunikasikan secara publik.

Upaya pemerintah desa dan sarana desa lainnya dalam pengabdian masyarakat yang profesional berpotensi memperluas wawasan dan memperkokoh kedisiplinan, namun semua upaya tersebut profesional dan transparan dalam pergerakan roda. Pemerintah. Di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Beech, M. K. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Dwiyanto. (2000). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjad Mada University Press.
- Sagala. (2009). *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: CV.
- Satori, D. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suit, A. Y. (2000). *Aspek Sikap Mental dalam Manajemen Sumber daya Manusia*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Suwinardi. (2017). Profesionalisme Dalam Bekerja. *ORBITH* , Edisi Juli 2017 Vol. 13. No. 2. <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/orbith/article/view/965/782>.
- Suyanto. (2005). *Konsep Dasar Usia Dini*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Tjokrowinoto. (2001). *"Pengembangan Sumber Daya Manusia Birokrasi : Kemelut Antara Negara, Masyarakat Sipil dan pasar" dalam Siaful Arif, (ed), Birokrasi dalam Polemik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widodo. (2005). *Panduan Lengkap Belajar Mikrokontroller Perancangan dan Aplikasi Mikrokontroller*. Jakarta: Gramedia Putra.
- Yani Alfian, A. P. (2019). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Desa Di Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung. *Jurnal JISIPOL* , Edisi November 2019 Vol. 3. No. 3. <https://ejournal.unibba.acid/index.php/jisipol/article/download/169/165/626>.